

Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pasirpogor

Sifa Fauziah¹, Kasan K. Suantha²

¹*Program Studi Manajemen, Universitas Teknologi Digital Bandung*

²*Program Studi Akuntansi, Universitas Teknologi Digital Bandung*

Abstrak

Pengalokasian dana desa sangat penting untuk kemajuan desa dalam menjalankan program kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa lebih memahami kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang menangani masalah yang lebih luas. Namun besarnya alokasi dana desa sering memicu faktor ketidakpercayaan masyarakat desa pasirpogor kabupaten bandung barat. Penelitian ini berusaha memberikan kontribusi mengenai isu-isu dikalangan masyarakat dan Mengukur sejauh mana pencapaian target keuangan telah direalisasikan dalam meningkatkan pembangunan sumber daya desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menilai bagaimana Dana Desa dikelola dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Penelitian ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan dana desa di Desa Pasirpogor berdampak positif pada pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Proses perencanaan yang demokratis, partisipatif, dan terstruktur memastikan pengelolaan dana desa memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat serta mengikuti prosedur yang ada. Transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi ditingkatkan melalui sistem informasi dan keterlibatan masyarakat. Mekanisme pertanggungjawaban, verifikasi, dan transparansi informasi yang efektif menjamin pengelolaan dana desa yang akuntabel dan responsif.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, Sumber Daya, Alokasi Dana Desa

Abstract

Allocation of village funds is very important for village progress in carrying out community welfare programs. Village governments understand community needs better than district governments which handle broader problems. However, the large allocation of village funds often triggers distrust among the people of Pasirpogor village, West Bandung district. This research seeks to contribute to issues among the community and measure the extent to which financial targets have been achieved in improving village resource development. This research uses qualitative methods to assess how Village Funds are managed at every stage, from planning to accountability.

This research proves that financial management of village funds in Pasirpogor Village has a positive impact on human resource development and community welfare. A democratic, participatory and structured planning process ensures that village fund management takes into account the needs and expectations of the community and follows existing procedures. Transparency, accountability and efficiency are improved through information systems and community involvement. Effective accountability, verification and information transparency mechanisms ensure accountable and responsive management of village funds.

Keywords: Financial Management, Resources, Village Fund Allocation

✉ Corresponding author :

Email Address : sifa10121977@digitechuniversity.ac.id

PENDAHULUAN

Desa merupakan wilayah tempat tinggal masyarakat dengan pemerintahan terendah di bawah kecamatan, memiliki otonomi dalam mengelola urusan sendiri di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa juga berfungsi sebagai pusat pengembangan pemerintahan, mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di desa, Djaenuri 2020 (Dini Safitri 2024). Keberhasilan pengelolaan keuangan desa sangat vital untuk kemajuan desa. Manajemen keuangan yang baik memerlukan tenaga kerja terampil dan dana yang memadai. Bagaimana desa mengelola keuangannya akan menentukan masa depannya, karena kemajuan desa bergantung pada bagaimana keuangannya dikelola.

Pembangunan di desa masih menghadapi banyak tantangan. Berbagai kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di era Orde Baru, kondisi sosial ekonomi di pedesaan masih jauh dari ideal. Oleh karena itu, pemerintah perlu fokus untuk memberdayakan masyarakat desa. Untuk mencapai tujuan ini, desa perlu diberi kewenangan dan dana yang cukup dari pemerintah pusat. Dana Desa krusial bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Ironisnya, meskipun dana desa dan anggaran pembangunan besar, permasalahan kesejahteraan di pedesaan tetap muncul, seringkali terkait dengan kurangnya transparansi dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya untuk infrastruktur. Muncul pertanyaan bagaimana desa tersebut melaksanakan pengelolaan dana desa dan apakah telah memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Apa saja hambatan manajemen keuangan desa untuk pembangunan sumber daya.

Pemerintah pusat mengalokasikan dana kepada desa melalui Dana Desa, atau Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memfasilitasi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Program ini mewajibkan kawasan pedesaan untuk Pengelolaan dana desa mengikuti Permendagri 113 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat (6), meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan (Berlian Putri Maha Rini 2019).

Tujuan utama pembangunan desa, sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat perdesaan. Hal ini dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan utama pembangunan desa adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup (Buku Pintar Dana Desa n.d.).

Fokus penelitian ini adalah mengkaji permasalahan umum dalam pengelolaan dana desa, terutama dalam penggunaan dana untuk mengembangkan sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pasirpogor."

METODOLOGI

Berdasarkan pendapat Sugiyono, sebagaimana dikutip oleh Ali Hartawan dkk. (2021) dan dikonfirmasi dalam penelitian (Fithriyyah, Anggilia Puspita, 2024) metode penelitian didefinisikan sebagai pendekatan ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan yang terarah. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus untuk mengevaluasi efektivitas program Dana Desa di Desa Pasirpogor pada tahun 2023. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan perangkat desa dan masyarakat, observasi partisipatif di Kantor Desa, serta analisis dokumen seperti

RKPDDes dan laporan anggaran. Analisis data dilakukan secara tematik, mencakup aspek kebijakan keuangan desa, faktor penghambat dan pendorong, serta tingkat kepuasan warga. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan kredibilitas temuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang dampak Dana Desa terhadap pengembangan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat Desa Pasirpogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Pengalokasian Dana Desa Di Desa Pasirpogor

1. Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara, proses perencanaan pengelolaan yang melibatkan seluruh elemen, berawal dari tingkat terendah sampai dengan tertinggi. Proses ini diawali dengan musyawarah, dan sebelum disahkan dalam APBDes, diawali dengan penyusunan RKPDDes memuat seluruh program Pertumbuhan desa yang direncanakan, serta program-program ini kemudian diurutkan berdasarkan prioritas. Menggambarkan proses perencanaan pemanfaatan dana desa yang demokratis, partisipatif, pula terstruktur. Ini menunjukkan bahwa administrasi dana desa dilakukan melalui metode mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mematuhi prosedur yang berlaku.

2. Pelaksanaan

Berdasarkan pembicaraan, Peran masyarakat dalam permusyawarahan sudah cukup baik, dengan melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat. Kesejahteraan masyarakat lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama, dengan alokasi dana yang terbagi merata di setiap wilayah dusun. Sedangkan Program di bidang pelayanan kesejahteraan seperti pelatihan keterampilan dan beasiswa tampaknya kurang mendapat perhatian.

Secara umum, Desa Pasirpogor telah menunjukkan upaya dalam membangun kolaborasi dengan masyarakat dalam rencana pengaturan Dana Desa dan menjalankan program yang beragam. Namun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diatasi, yaitu: Menyeimbangkan alokasi dana untuk program kesejahteraan, dan memperhatikan program pelatihan keterampilan dan beasiswa untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia, dan penggunaan yang masih belum berpedoman pada peraturan yang berlaku.

3. Penatausahaan

Pasirpogor sudah menerapkan aplikasi siskedes untuk pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Aplikasi ini memudahkan pengecekan dan sinkronisasi antara data pengeluaran di siskedes dan realisasi APBDes. Dipantau langsung oleh BPKP dan inspektorat, memastikan seluruh pencatatan sesuai dengan aturan. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menjaga keakuratan dan kelengkapan pencatatan.

Desa Pasirpogor menerapkan transparansi pelaporan secara manual dengan memajang laporan setiap kegiatan di depan desa. Selain laporan manual, Desa Pasirpogor juga menggunakan papan kegiatan untuk menampilkan informasi tentang anggaran yang dibutuhkan dan proses pembangunan.

Desa Pasirpogor telah menunjukkan tindakan yang efektif dalam meningkatkan keterbukaan, akuntabilitas, juga efisiensi cara mengelola dana desa melalui penggunaan sistem informasi dan melibatkan masyarakat.

4. Pelaporan

Laporan disusun dalam bentuk LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) yang memuat informasi detail dan didukung bukti sah, memastikan pertanggungjawaban penggunaan dana. Pencairan dana dilakukan secara bertahap, mencerminkan pengelolaan yang hati-hati. Laporan keuangan desa diperiksa oleh inspektorat setiap

tahun, menandakan adanya kontrol ketat untuk mencegah penyalahgunaan dana. Dengan penggunaan aplikasi, pemeriksaan inspektorat, dan publikasi informasi kepada masyarakat, desa dapat memastikan akuntabilitas dan efisiensi.

Realisasi pencatatan di aplikasi siskedes telah disinkronkan dengan APBDes, menjamin akurasi pencatatan keuangan dan pembayaran pajak. Transparansi ditingkatkan dengan mempublikasikan informasi penggunaan dana melalui baliho, spanduk, dan website desa yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui kegiatan yang dilaksanakan. Ini menunjukkan upaya baik dalam menciptakan sistem pelaporan yang lengkap, terstruktur, dan transparan.

5. Pertanggungjawaban

Berdasarkan temuan wawancara, manajemen dana desa di kelurahan Pasirpogor menunjukkan mekanisme yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, terkait dengan pertanggungjawaban, verifikasi, dan transparansi informasi kepada masyarakat. Proses verifikasi yang melibatkan berbagai pihak, serta penyampaian laporan melalui musyawarah desa, menjamin transparansi dan akuntabilitas. Namun, perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang laporan yang disampaikan dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam pengawasan penggunaan dana desa.

6. Evaluasi Dan Monitoring

Mekanisme pemeriksaan internal dan eksternal berupaya untuk memastikan sistem pengelolaan dana desa yang baik serta berkewajiban. Ini menandakan adanya lebih dari satu pihak yang ikut serta dalam pengawasan penggunaan dana desa. Pemeriksaan rutin memungkinkan deteksi masalah lebih awal dan penanganan yang cepat. Penilaian kesesuaian antara pembangunan fisik dan anggaran dalam APBDes menunjukkan perhatian terhadap akuntabilitas keuangan, memastikan dana digunakan sesuai tujuan yang ditetapkan. Meskipun keberhasilan pelayanan kesehatan tidak selalu tampak secara fisik, upaya desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menunjukkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan.

Secara keseluruhan, penjelasan ini menunjukkan bahwa Desa Pasirpogor memiliki sistem pemeriksaan yang efektif dan berupaya untuk menjaga pengaturan Dana Desa yang bertanggung jawab, terbuka, termasuk responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

Pembangunan Sumber Daya Desa Pasirpogor

1. Peningkatan Pendidikan

Di Desa Pasirpogor, tingkat ketidaktamatan sekolah dasar (SD) sudah menurun, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam akses pendidikan. Hal ini terjadi seiring dengan kebijakan pendidikan gratis yang meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka. Akses yang lebih baik ke sekolah karena jarak yang dekat dengan pemukiman juga berkontribusi pada peningkatan angka partisipasi pendidikan.

Meskipun desa tersebut belum merasakan dampak langsung dari program Alokasi Dana Desa (ADD), angka putus sekolah tetap terjaga. Ini menunjukkan bahwa meskipun program ADD belum sepenuhnya diterapkan atau memberikan hasil yang terlihat, intervensi lain, seperti bantuan pemerintah bagi masyarakat kurang mampu, berperan penting dalam mengurangi angka putus sekolah.

2. Peningkatan Kesehatan

Program kesehatan yang komprehensif dengan tujuan meningkatkan gizi, menekan angka stunting, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pasirpogor telah dilaksanakan. Meskipun kesehatan masyarakat masih menunjukkan fluktuasi, upaya yang dilakukan menunjukkan adanya perbaikan dalam praktik kesehatan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap layanan kesehatan formal. Ini merupakan langkah positif menuju peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut hasil wawancara, secara keseluruhan, Desa Pasirpogor menghadapi tantangan dalam hal pemberdayaan masyarakat karena prioritas yang lebih besar diberikan kepada pembangunan fisik. Hal ini berdampak pada partisipasi masyarakat yang terbatas dalam pengelolaan desa. Keterbatasan anggaran dan kurangnya keberlanjutan program menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi pemberdayaan masyarakat.

Untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, perlu adanya keseimbangan antara pembangunan fisik dan program pemberdayaan yang berkelanjutan, serta anggaran yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan program-program tersebut.

Pengaruh Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Dana Desa di Desa Pasirpogor

1. Faktor Pendorong

a. Partisipasi Masyarakat

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pasirpogor sangat aktif terlibat dan berkontribusi besar dalam pengelolaan dana desa. Keterlibatan mereka dalam berbagai tahap pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dan semangat gotong royong mereka, telah menciptakan kolaborasi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah desa. Peningkatan partisipasi dan kerja sama ini merupakan tanda positif untuk keberhasilan proyek-proyek pembangunan di desa.

b. Infrastruktur dan Teknologi

Upaya pemerintah Desa Pasirpogor dalam menyediakan infrastruktur dan teknologi yang memadai merupakan langkah penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Meskipun terdapat kendala dalam aksesibilitas fasilitas sosial, melakukan survei dan memperhatikan kebutuhan masyarakat menjadi kunci untuk perencanaan yang lebih baik. Dengan demikian, komitmen pemerintah desa dalam mendukung infrastruktur dan teknologi dapat mendorong keberhasilan program pembangunan secara optimal dan transparan.

2. Faktor Kendala

a. Sumber Daya Pekerja

Hasil wawancara memperlihatkan terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa di kawasan Pasirpogor menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan kinerja

aparatur pemerintah menjadi kurang maksimal. Untuk memperbaiki pengelolaan ADD, perlu dilakukan perbaikan dalam sistem administrasi, peningkatan keterampilan sumber daya manusia, serta penyesuaian program agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pencarian sumber pendanaan alternatif dan penanganan fluktuasi harga juga menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan.

Upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan bagi aparatur desa dapat membantu mengatasi permasalahan ini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa.

b. Panduan Teknis Alokasi Dana Desa Mengalami Perubahan Tiap Tahunnya

Menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa di wilayah Pasirpogor ditekan oleh perubahan Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa yang terjadi setiap tahunnya. Perubahan ini disebabkan oleh penyesuaian kebijakan pemerintah dan kebutuhan yang berkembang, seperti penanganan pandemi COVID-19.

Perubahan Petunjuk Teknis dapat berdampak pada prioritas Pengelolaan Dana Desa juga pembagian Pendanaan, yang perlu diperhatikan oleh aparatur pemerintah Desa Pasirpogor menjamin bahwa program yang dilaksanakan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mencapai sasaran pembangunan yang optimal.

Kepuasan Masyarakat Desa Pasirpogor Mengenai Dampak Pengelolaan Pada Kesejahteraan Mereka

1. Aspek Ekonomi

Hasil wawancara mengindikasikan bahwa penyaluran Dana Desa di Desa Pasirpogor belum benar-benar memberikan dampak positif terhadap keadaan ekonomi masyarakat. Meskipun terdapat peningkatan akses, tantangan masih ada, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam pekerjaan, minimnya kesempatan kerja, dan kondisi perekonomian yang belum menunjukkan perkembangan signifikan, terutama di sektor pertanian. Oleh sebab itu, diperlukan penilaian serta perbaikan dalam pengelolaan dana desa meyakinkan bahwa dana tersebut bisa memberikan nilai tambah yang lebih besar untuk masyarakat, serta meningkatkan keterlibatan dan peluang ekonomi bagi warga desa.

2. Aspek Sosial

Mengindikasikan pengelolaan dana desa di Desa Pasirpogor masih belum sepenuhnya berdampak positif terhadap aspek sosial masyarakat. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan akses dan infrastruktur, tantangan masih ada, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kesulitan dalam mengatasi kesenjangan sosial, dan akses yang belum merata. Sebab itu, dibutuhkan evaluasi serta perbaikan pada manajemen dana desa untuk mengevaluasi bahwa dana tersebut dapat berkontribusi positif bagi kesejahteraan sosial orang-orang sekitar, meningkatkan keterlibatan aktif, juga menekan kesetaraan akses bagi seluruh warga desa.

3. Tingkat Kepuasan

Hasil wawancara kepuasan masyarakat terhadap tata kelola keuangan Dana Desa di Desa Pasirpogor menunjukkan tingkat kepuasan yang beragam dari 20 responden. Penelitian ini mengeksplorasi persepsi dan pengalaman masyarakat Desa Pasirpogor terkait pengelolaan keuangan Dana Desa. Hasil wawancara menunjukkan adanya berbagai pandangan juga pengamatan terkait transparansi, akuntabilitas, serta dampak Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

1) Temuan Utama:

- a. Kepuasan yang beragam: Meskipun sebagian besar responden (50%) menyatakan puas, temuan ini membuktikan adanya keragaman persepsi dan pengalaman. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya memenuhi harapan seluruh masyarakat. Sebanyak 25% responden menyatakan netral, menjelaskan adanya potensi peningkatan dan perbaikan yang perlu dipertimbangkan.
- b. Suara ketidakpuasan: Indikasi ketidakpuasan (20% responden) perlu mendapat perhatian serius. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali lebih dalam alasan di balik ketidakpuasan tersebut. Hal ini penting untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam manajemen keuangan Dana Desa.
- c. Kasus sangat puas yang terbatas: Hanya sedikit responden (5%) yang menyatakan sangat puas. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada potensi untuk meningkatkan kepuasan masyarakat secara keseluruhan.

2) Implikasi:

Secara keseluruhan, temuan penelitian membuktikan bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Pasirpogor memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Meskipun mayoritas responden menyatakan puas, masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Temuan ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan anggaran Desa dan dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan serta perbaikan manajemen dana desa di masa mendatang. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menyelidiki lebih lanjut alasan di balik ketidakpuasan atau netralitas responden, juga mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam manajemen keuangan Dana Desa agar berpotensi lebih efektif meningkatkan pembangunan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat.

Kutipan dan Acuan

Manajemen Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah Purba et al., 2021 dikonfirmasi dalam penelitian (Kusmayadi and Utami n.d.) merupakan tahapan terencana yang menghasilkan berbagai langkah, seperti rancangan, implementasi, pencatatan, pemberitahuan, pertanggungjawaban, serta pengawasan. Proses ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, panduan, juga pengawasan kegiatan keuangan, seperti penyediaan dan penggunaan dana. (Puspita Devi n.d.) Menambahkan pada dasarnya, manajemen keuangan adalah prosedur mengelola uang dengan bijak. Ini meliputi pengumpulan, mengalokasikan, dan mengendalikan dana untuk mencapai sasaran finansial yang telah ditetapkan. Nurdiansyah dan Rahman (2019:74)

mengidentifikasi fungsi-fungsi utama dalam manajemen keuangan: (William Sanger et al. 2023)

1. Perencanaan dan penganggaran: Proses merencanakan dan mengalokasikan dana perusahaan untuk berbagai aktivitas dan kebutuhan bisnis.
2. Pengendalian (*Controlling*): Proses mengawasi dan memantau semua aktivitas keuangan, termasuk penyaluran dana dan pencatatannya, untuk kemudian dievaluasi dan digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan perusahaan selanjutnya.
3. Penilaian: Audit internal adalah proses yang memastikan bahwa semua kegiatan keuangan sesuai dengan standar akuntansi dan mencegah penyimpangan.
4. Penyusunan Laporan: Pelaporan keuangan tahunan adalah proses penyusunan laporan keuangan yang mencakup analisis rasio laba dan rugi perusahaan.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif meliputi konsistensi, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan bisnis. Tujuan utama dari pengelolaan keuangan adalah untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang struktur kekayaan, finansial, dan permodalan melalui pengalaman dan praktik di lapangan.

Dana Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyalurkan kewenangan kepada lembaga pemerintah untuk memberikan anggaran dana desa setiap tahun dari Anggaran Negara. Dana ini ditujukan untuk membiayai kegiatan di desa dan disalurkan melalui Anggaran Daerah. Tujuannya adalah untuk menggabungkan dan memaksimalkan penggunaan anggaran dari pemerintah pusat ke desa. Pemberian Dana Desa menggunakan dua cara: pertama, dibagikan secara merata kepada semua desa; kedua, dibagikan berdasarkan kriteria faktor-faktor demografi, geografis, dan sosial ekonomi (Buku Pintar Dana Desa n.d.).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memajukan desa. Melalui ADD, pemerintah mengharapkan masyarakat desa dapat berkontribusi aktif dalam menentukan arah pembangunan kawasan pedesaan (Mamuaja et al. 2021).

Penggunaan Dana Desa yang diutamakan untuk pengembangan desa sesuai (Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 n.d.) mencakup:

1. Infrastruktur Energi Terbarukan dan Lingkungan: Membangun dan mengembangkan infrastruktur energi terbarukan dan kegiatan yang mendukung pelestarian lingkungan.
2. Infrastruktur Penghidupan: Membangun, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur fisik yang mendukung penghidupan masyarakat, termasuk ketahanan pangan dan permukiman.
3. Kesehatan Masyarakat: Membangun, mengembangkan, dan memelihara fasilitas dan infrastruktur kesehatan untuk meningkatkan kesehatan.
4. Sektor Usaha Rakyat: Memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat, mencakup pembangunan dan menjaga kelancaran infrastruktur produksi dan distribusi.
5. Pendidikan, Energi, serta Kebudayaan: Membangun, mengembangkan, juga memelihara aset Pendidikan, Energi dan kebudayaan serta infrastruktur.

Intinya, pembangunan desa diarahkan pada kesejahteraan masyarakat dengan prinsip pengelolaan keuangan desa yang melibatkan partisipasi aktif seluruh warga (Ramdan and Dwi Marselina 2024).

Pengelolaan Dana Desa

Mekanisme manajemen Dana Desa, sebagaimana dalam (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 n.d.), terdiri dari lima tahapan terstruktur:

1. Perencanaan

Tahapan penentuan cara mencapai tujuan, melibatkan penetapan waktu, metode, dan pihak-pihak terkait, dan tertuang dalam RKPDesa yang mencakup RKJMDesa, pengelolaan desa, pelatihan, dan pengembangan masyarakat. Proses ini melibatkan rapat desa dengan BPD dan warga, disepakati dalam forum diskusi.

2. Pelaksanaan

Proses pengelolaan keuangan desa berdasarkan APBDDes meliputi program pelayanan, pembangunan, dan pengembangan masyarakat, dengan semua transaksi keuangan tercatat, dibuktikan, dan disahkan.

3. Penatausahaan

Dilakukan oleh Bendahara Desa yang mencatat penerimaan dan pengeluaran, menutup buku bulanan, dan mempertanggungjawabkan transaksi.

4. Pelaporan

Realisasi APBDDes disampaikan kepada Bupati/Walikota secara berkala (laporan semester akhir Juli dan laporan akhir tahun akhir Januari).

5. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota, meliputi laporan realisasi APBDDes, aset desa, dan program pemerintah pusat/daerah.

Pengelolaan ini berpedoman pada asas transparansi, tanggung jawab, keikutsertaan, dan disiplin anggaran.

Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan pembangunan sumber daya sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat (Etika and Waruwu n.d.) Sumber daya yang melimpah dan terkelola baik berpengaruh pada kemajuan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kemiskinan. (Resya Dwi Marselina et al. 2024) Menambahkan bahwa pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan juga penting sebab manusia merupakan aset paling berharga dalam pengelolaan, oleh karena itu, keberadaannya harus dilindungi dan dimaksimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah proses strategis untuk mengelola sumber daya manusia, yang merupakan aset utama dalam tim, kelompok, atau organisasi, guna mencapai tujuan perusahaan, akses terhadap infrastruktur juga merupakan faktor penting. Secara ringkas, pembangunan sumber daya merupakan sebuah proses strategis yang menggabungkan

berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya yang tersedia, dengan tujuan akhir mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan ke depan. Kesejahteraan masyarakat desa mencakup aspek ekonomi (pendapatan, akses ekonomi) dan sosial (kesehatan, pendidikan, keamanan) (Soetomo, 2014 dalam Dewi Kusuma Wardani 2020). Sumber daya, menurut KBBI, meliputi faktor produksi dan bahan atau keadaan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia (Banoraja Purba, dkk. 2023). Sumber Daya Menurut Para Ahli n.d.)(Banoraja Purba, dkk. 2023). Aset desa meliputi sumber daya alam, potensi manusia, sumber daya sosial, dan sumber daya ekonomi.

SIMPULAN

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Pasirpogor secara umum berjalan baik, dibuktikan dengan adanya perencanaan partisipatif, sistem penatausahaan dan pelaporan yang transparan, serta penggunaan aplikasi SiSKeDes. Pengawasan oleh BPKP dan Inspektorat serta publikasi informasi kepada masyarakat mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Mekanisme pertanggungjawaban dan sistem monitoring serta evaluasi yang melibatkan pemeriksaan internal dan eksternal juga menunjukkan upaya untuk memastikan pengelolaan dana yang bertanggung jawab.
2. Penelitian ini mengungkapkan kendala dalam pengelolaan Dana Desa, di mana alokasi dana lebih fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, sementara program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan dan beasiswa kurang diperhatikan. Akibatnya, pemberdayaan masyarakat tetap terbatas dan belum sepenuhnya berdampak positif pada aspek ekonomi dan sosial.
3. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa beragam, dengan 50% responden menyatakan puas, 25% netral, dan 20% tidak puas. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan. Tingginya proporsi ketidakpuasan memerlukan investigasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebabnya dan merumuskan solusi yang efektif. Potensi untuk meningkatkan kepuasan masih besar, mengingat hanya 5% responden yang menyatakan sangat puas.

Referensi :

- Berlian Putri Maha Rini, Rochmad Bayu Utomo. 2019. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Dana Desa Tahun 2018 Di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul)* (Mei 2019). (Vol 5 Nomor 1-ISSN 24601233).
- Buku Pintar Dana Desa. n.d. *A Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Indonesia Dana Desa*.
- Dewi Kusuma Wardani, Ratih Ranika Putri Utami. 2020. *Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo* (Januari 2020). (Vol 28 Nomor 1).
- Dini Safitri, Resya Dwi Marselina. 2024. *Analisis Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Desa Cikande Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat*.
- Etika, Siska, and Rahmat Niar Waruwu. n.d. *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lasarabane* (Januari 2023). (Vol. 4 Nomor 1-ISSN 27456544).
- Fithriyyah, Luthfiy, Vina Anggilia Puspita, and Program Studi Manajemen. 2024. "Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk." *Jurnal Simki Economic* 7(2):367-79.

- Kusmayadi, Dicki, and Helmalia Putri Utami. n.d. *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lasarabane* (Januari 2023). (Vol. 4 Nomor 1-ISSN 27456544).
- Mamuaja, Jovanca, Freddy Kawatu, Anita Kambey, Jurusan Akuntansi, and Fakultas Ekonomi. 2021. *EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SEA SATU KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA*. Vol. 2.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. n.d. *MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2014*.
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. n.d. *MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2014*.
- Puspita Devi, Rizca. n.d. "Model Manajemen Keuangan Usaha Kecil Menengah Dalam Upaya Merumuskan Strategi Manajemen Keuangan (Studi Kasus Pada UMKM Di Kecamatan Majalaya Dan Kecamatan Ciparay Kab. Bandung)."
- Ramdan, Cecep Muhamad, and Resya Dwi Marselina. 2024. *PENGARUH SDM PERANGKAT DESA TERHADAP HASIL KINERJA PEMBANGUNAN FISIK DI DESA KARANGHARJA*. Vol. 8.
- Resya Dwi Marselina, Adjie Saepul Adha, Azfi Shafia Marwah Anandhita, Depi Febriyan, Siti Maesaroh, and Tiara Mustika Saldan. 2024. "Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Hubungan Industrial Pada Karyawan Administrasi Di RSUD Bandung Kiwari." *Manajemen Kreatif Jurnal* 2(1):137-50. doi: 10.55606/makreju.v2i1.2641.
- Sumber Daya Menurut Para Ahli. n.d.
- William Sanger, Gerald, Hendrik Manossoh, Claudia W. M Korompis, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, and Jl Kampus Bahu. 2023. *Evaluasi Kinerja Keuangan Dengan Metode Value For Money Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado Evaluation of Financial Performance Using the Value For Money Method in Financial Institutions and Regional Assets in the City of Manado*. Vol. 6.